

PERKEMBANGAN PEMBANGUNAN PROVINSI SUMATERA SELATAN 2014

OUTLINE ANALISIS PROVINSI

1. Perkembangan Indikator Utama
 - 1.1 Pertumbuhan Ekonomi
 - 1.2 Pengurangan Pengangguran
 - 1.3 Pengurangan Kemiskinan
2. Kinerja Pembangunan Kota/ Kabupaten
 - 2.1 Pertumbuhan Ekonomi dan Pengurangan kemiskinan
 - 2.2 Pertumbuhan Ekonomi dan Peningkatan IPM
 - 2.3 Pertumbuhan Ekonomi dan Pengurangan Pengangguran
 - 2.4 Kesenjangan Wilayah
3. Penyebab Permasalahan Pembangunan
 - 3.1 Tingginya Ketergantungan pada Sektor Primer
 - 3.2 Masih Rendahnya Produktivitas Sektor Pertanian
 - 3.3 Tingginya Peran Konsumsi Sebagai Sumber Pertumbuhan Ekonomi
 - 3.4 Terbatasnya Infrastruktur Wilayah dalam Mendukung Sistem Logistik yang Efisien
 - 3.5 Kualitas Sumber Daya Manusia
 - 3.6 Belum Optimalnya Belanja Pemerintah Daerah dalam Mendukung Pertumbuhan
 - 3.7 Berkurangnya Daya Dukung Lingkungan
4. Prospek Pembangunan Tahun 2015
5. Penutup
 - 5.1 Isu Strategis Daerah
 - 5.2 Rekomendasi Kebijakan



Desember 2014

SERI ANALISA PEMBANGUNAN DAERAH

Perkembangan Pembangunan Provinsi Sumatera Selatan 2014

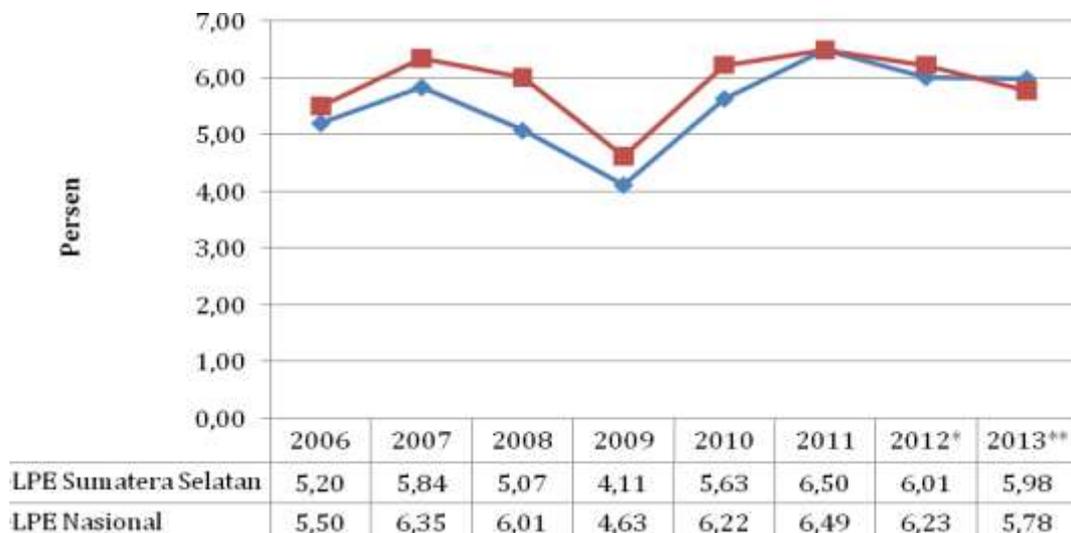
SERI ANALISA PEMBANGUNAN DAERAH

A. Perkembangan Indikator Kinerja Utama

1. Pertumbuhan Ekonomi

Provinsi Sumatera Selatan sebagai salah satu lumbung padi di luar Pulau Jawa memiliki peran penting bagi perekonomian wilayah dan nasional. Kinerja perekonomian Sumatera Selatan selama periode 2006-2013 tumbuh lebih lambat dari laju pertumbuhan nasional. Perekonomian pada periode tersebut tumbuh dengan laju rata-rata 5,54 per tahun, lebih rendah dari laju rata-rata nasional sebesar 5,90 persen (Gambar 1). Salah satu penyebabnya adalah perlambatan produksi migas yang memiliki pangsa cukup besar dalam perekonomian daerah. Perekonomian Sumatera Selatan termasuk tiga besar di wilayah Sumatera setelah Riau dan Sumatera Utara. Pada tahun 2012 sumbangan PDRB Sumatera Selatan secara nasional mencapai 3,06 persen, sedangkan di tingkat wilayah Sumatera mencapai 13 persen.

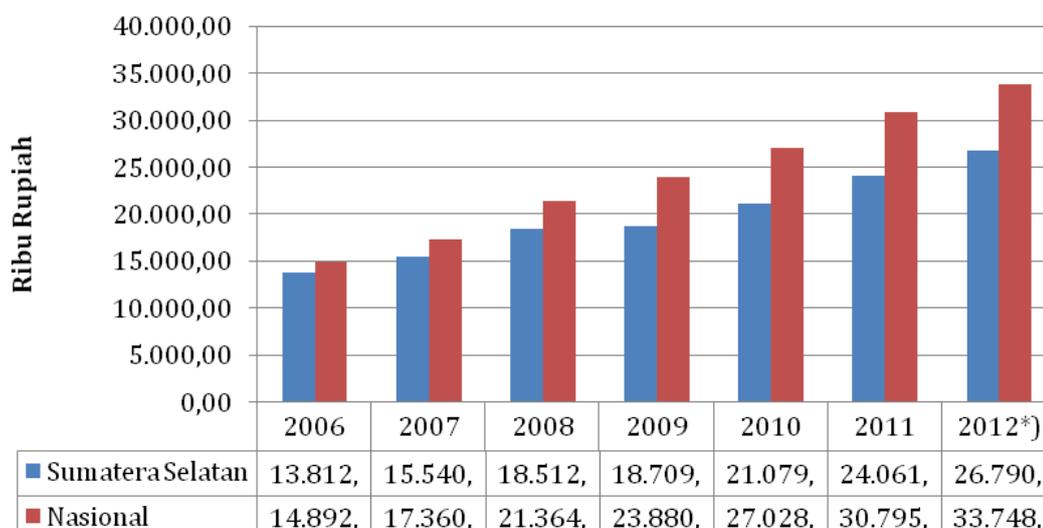
Gambar 1
Laju Pertumbuhan PDRB ADHK 2000



Sumber: BPS, 2013

Sejalan dengan pertumbuhan ekonomi daerah, pendapatan perkapita masyarakat juga meningkat. PDRB per kapita tanpa migas dapat dianggap sebagai perkiraan perhitungan pendapatan masyarakat daerah. Selama periode tahun 2006 – 2012 pendapatan perkapita Sumatera Selatan cenderung meningkat (Gambar 2). Jika pada tahun 2006 rasio PDRB per kapita antara Sumatera Selatan dan rata-rata nasional adalah 92,75 persen maka pada tahun 2012 rasionya menurun menjadi 79,38 persen. Secara perkapita perekonomian wilayah lain tumbuh relatif lebih cepat dibandingkan Sumatera Selatan.

Gambar 2
PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku

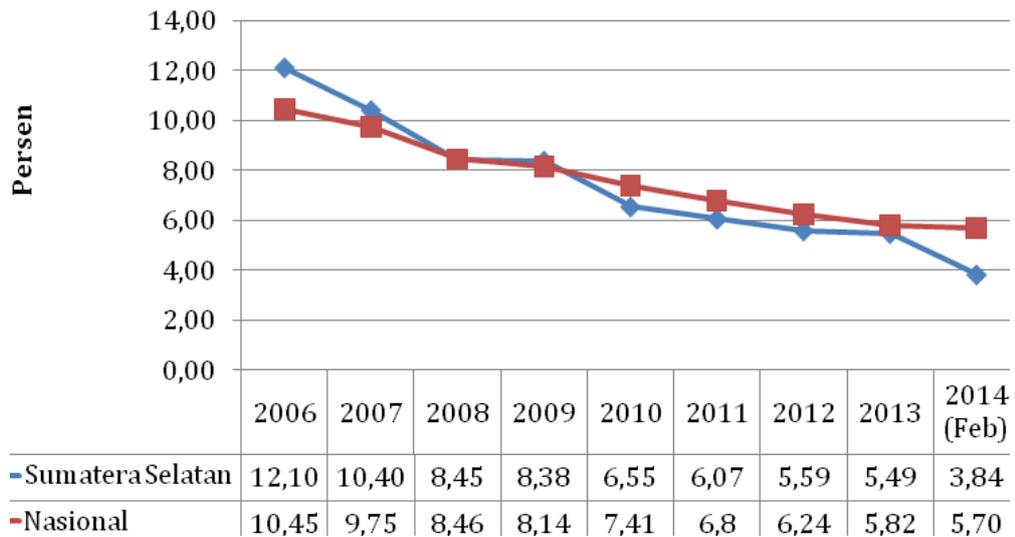


Sumber: BPS, 2012

2. Pengurangan Pengangguran

Pertumbuhan ekonomi dapat dinikmati masyarakat apabila mampu memperluas lapangan kerja baru dan sekaligus mengurangi angka pengangguran. Dalam hal ini, pertumbuhan ekonomi Sumatera Selatan berhasil menurunkan jumlah pengangguran di daerah (Gambar 3). Tingkat pengangguran terbuka relatif tinggi pada tahun 2006 sebagai dampak kenaikan harga BBM, namun kemajuan kegiatan ekonomi mampu menurunkan tingkat pengangguran secara signifikan. Selama periode 2006 – 2013 tingkat pengangguran terbuka di Sumatera Selatan berkurang sebesar 4,63 persen.

Gambar 3
Tingkat Pengangguran Terbuka

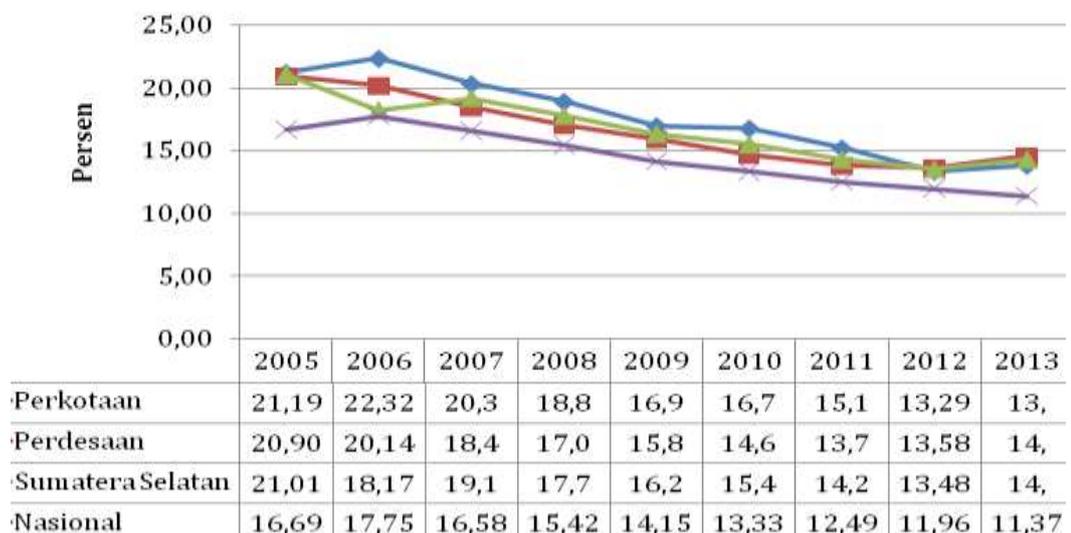


Sumber: BPS, 2014

3. Pengurangan Kemiskinan

Peningkatan pendapatan masyarakat dan penurunan tingkat pengangguran juga akan diiringi dengan penurunan tingkat kemiskinan daerah. Persentase penduduk miskin di Sumatera Selatan terus menurun secara konsisten sejak tahun 2006 – 2013 khususnya di perdesaan. Hal ini juga menunjukkan bahwa perekonomian daerah perdesaan relatif tidak terkena dampak buruk kenaikan harga BBM pada tahun 2006. Tantangan yang harus dihadapi adalah melakukan percepatan pengurangan kemiskinan karena secara nasional persentase penduduk miskin di Sumatera Selatan masih lebih tinggi dari persentase di tingkat nasional

Gambar 4
Persentase Penduduk Miskin



Sumber: BPS, 2013

B. Kinerja Pembangunan Kabupaten/Kota

Kinerja pembangunan Provinsi Sumatera Selatan sangat ditentukan oleh kualitas pertumbuhan ekonomi di setiap kabupaten/kota. Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas seringkali dipahami sebagai peningkatan nilai tambah yang diikuti oleh perluasan lapangan kerja, pengurangan kemiskinan dan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

1. Pertumbuhan Ekonomi dan Pengurangan Pengangguran

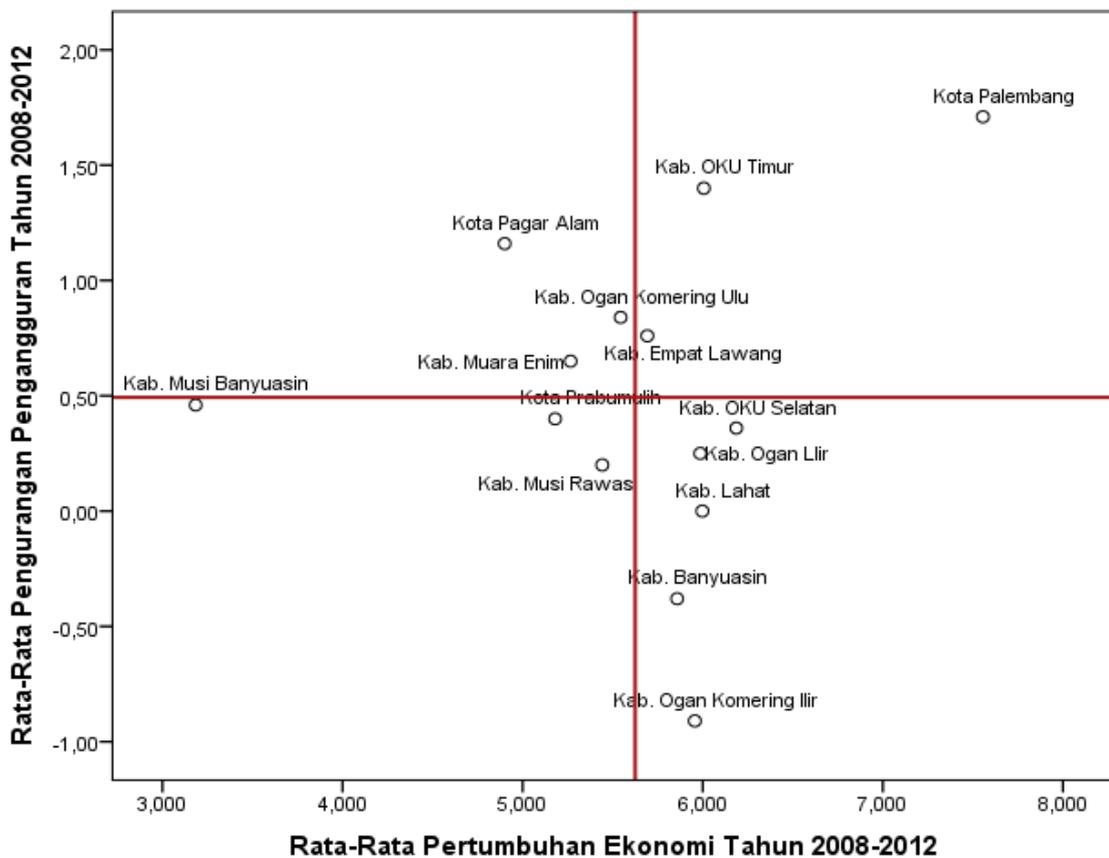
Persebaran kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan menurut rata-rata pertumbuhan ekonomi dan pengurangan pengangguran selama tahun 2008-2012 adalah sebagai berikut (Gambar5). *Pertama*, Kabupaten Empat Lawang, OKU Timur, dan Kota Palembang termasuk kabupaten dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi dan pengurangan pengangguran di atas rata-rata provinsi. Kondisi ini menyiratkan bahwa pertumbuhan ekonomi dapat mendorong perluasan lapangan kerja (*pro-growth, pro-job*). Tantangan yang dihadapi oleh pemerintah daerah adalah menjaga momentum pertumbuhan dengan tetap meningkatkan produktivitas dan nilai tambah sektor-sektor yang menyerap tenaga kerja seperti pertanian, perkebunan, kelautan dan perikanan.

Kedua, Kabupaten Ogan Komiring Ulu, Muara Enim, dan Kota Pagaralam yang terletak di kuadran II termasuk kategori daerah dengan pertumbuhan ekonomi di bawah rata-rata, tapi pengurangan pengangguran di atas rata-rata (*low growth, pro-job*). Hal ini mengindikasikan bahwa perluasan lapangan kerja terjadi pada sektor ekonomi dengan pertumbuhan rendah seperti pertanian dan perikanan.

Ketiga, Kabupaten Musi Banyuasin, Musi Rawas, dan Kota Prabumulih terletak di kuadran III dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi dan pengurangan pengangguran di bawah rata-rata provinsi (*low growth, less pro-job*). Hal ini menegaskan bahwa pemerintah daerah harus bekerja keras untuk memacu pengembangan sektor atau kegiatan ekonomi yang mampu menyerap tenaga kerja secara lebih besar.

Keempat, Kabupaten Ogan Hilir, OKU Selatan, Ogan Komiring Ilir, Lahat, dan Banyuasin terletak di kuadran IV dengan rata-rata pertumbuhan tinggi di atas rata-rata, tapi pengurangan pengangguran di bawah rata-rata (*high-growth, less-pro job*). Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi di wilayah tersebut tidak diimbangi dengan penurunan jumlah pengangguran dengan laju yang sama. Daerah tersebut termasuk daerah perkebunan, dan daerah perkotaan yang harus menampung migrasi penduduk dari daerah perdesaan. Tantangan yang harus dihadapi adalah mendorong pengembangan sektor dan kegiatan ekonomi yang menyerap tenaga kerja relatif tinggi seperti pertanian dan perkebunan. Tantangan lainnya adalah mengembangkan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi yang mampu menyerap tenaga kerja di sektor informal.

Gambar 5
Dampak Pertumbuhan Ekonomi terhadap Pengurangan Jumlah Pengangguran
2008-2012



Sumber: BPS, 2012 (diolah)

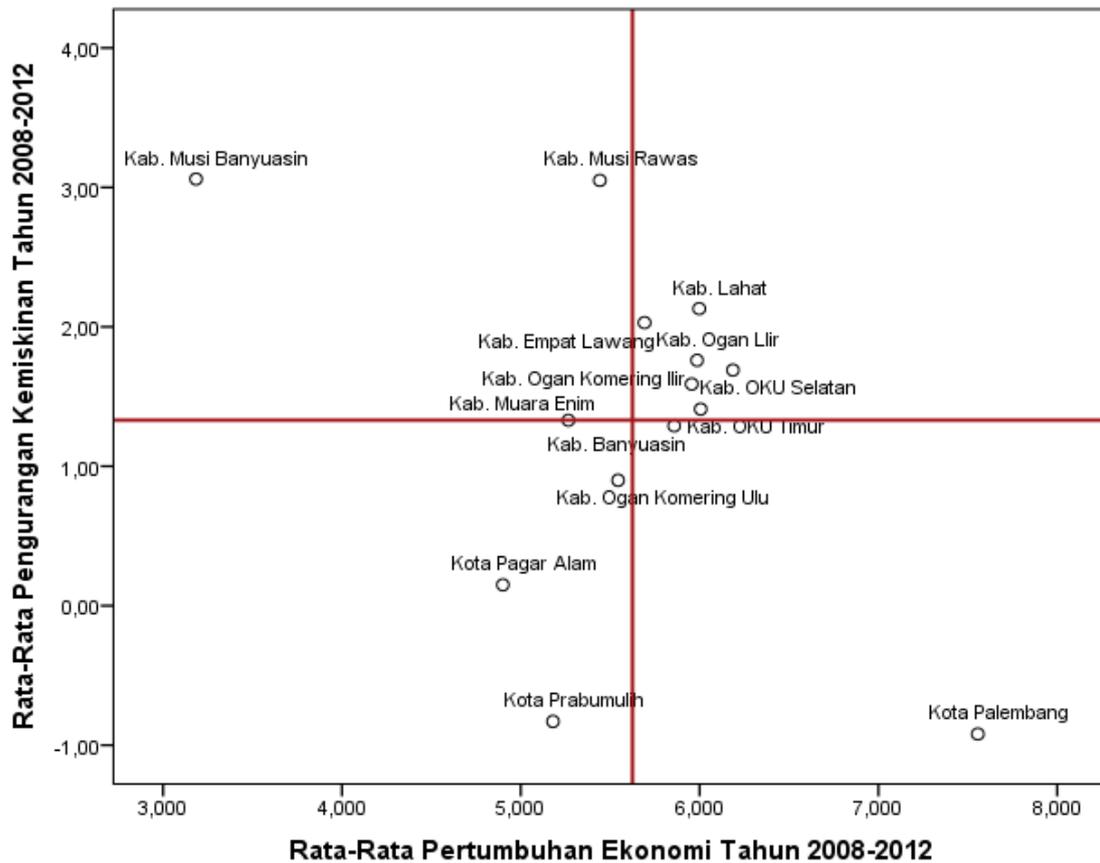
2. Pertumbuhan Ekonomi dan Pengurangan Kemiskinan

Gambar 6 menunjukkan dampak pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan dengan penjelasan sebagai berikut. *Pertama*, Kabupaten Lahat, Empat Lawang, Ogan Ilir, OKU Selatan, dan Ogan Komering Ilir termasuk daerah kabupaten dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan di atas rata-rata provinsi. Dengan kata lain, pertumbuhan ekonomi yang terjadi dapat mendorong pengurangan kemiskinan secara lebih cepat (*pro-growth, pro-poor*). Tantangan yang harus dihadapi oleh pemerintah daerah adalah menjaga momentum pertumbuhan ekonomi dengan tetap meningkatkan upaya pengurangan kemiskinan.

Kedua, kabupaten Muliawati, Muliawati, dan Muara Enim terletak di kuadran II, termasuk kategori daerah dengan pertumbuhan ekonomi di bawah rata-rata, tapi pengurangan kemiskinan di atas rata-rata (*low growth, pro-poor*). Tantangan yang harus diatasi oleh pemerintah daerah adalah menjaga efektivitas dan efisiensi kebijakan dan program pengurangan kemiskinan, dan secara bersamaan mendorong percepatan pembangunan ekonomi dengan prioritas sektor

atau kegiatan ekonomi yang punya potensi berkembang seperti pertanian, perkebunan, kelautan dan perikanan, serta perdagangan dan jasa.

Gambar 6
Dampak Pertumbuhan Ekonomi terhadap Pengurangan Jumlah Penduduk Miskin Tahun 2008-2012



Sumber: BPS, 2012 (diolah)

Ketiga, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Kota Pagar Alam, dan Kota Prabumulih terletak di kuadran III dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan di bawah rata-rata provinsi (*low growth, less pro-poor*). Kinerja pembangunan daerah tersebut menegaskan bahwa pemerintah daerah harus bekerja keras untuk mendorong percepatan pembangunan ekonomi melalui peningkatan produktivitas sektor atau kegiatan ekonomi yang mampu menyerap tenaga kerja secara lebih besar dari golongan miskin. Selain itu, pemerintah daerah juga dituntut untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi berbagai kebijakan dan program pengurangan kemiskinan.

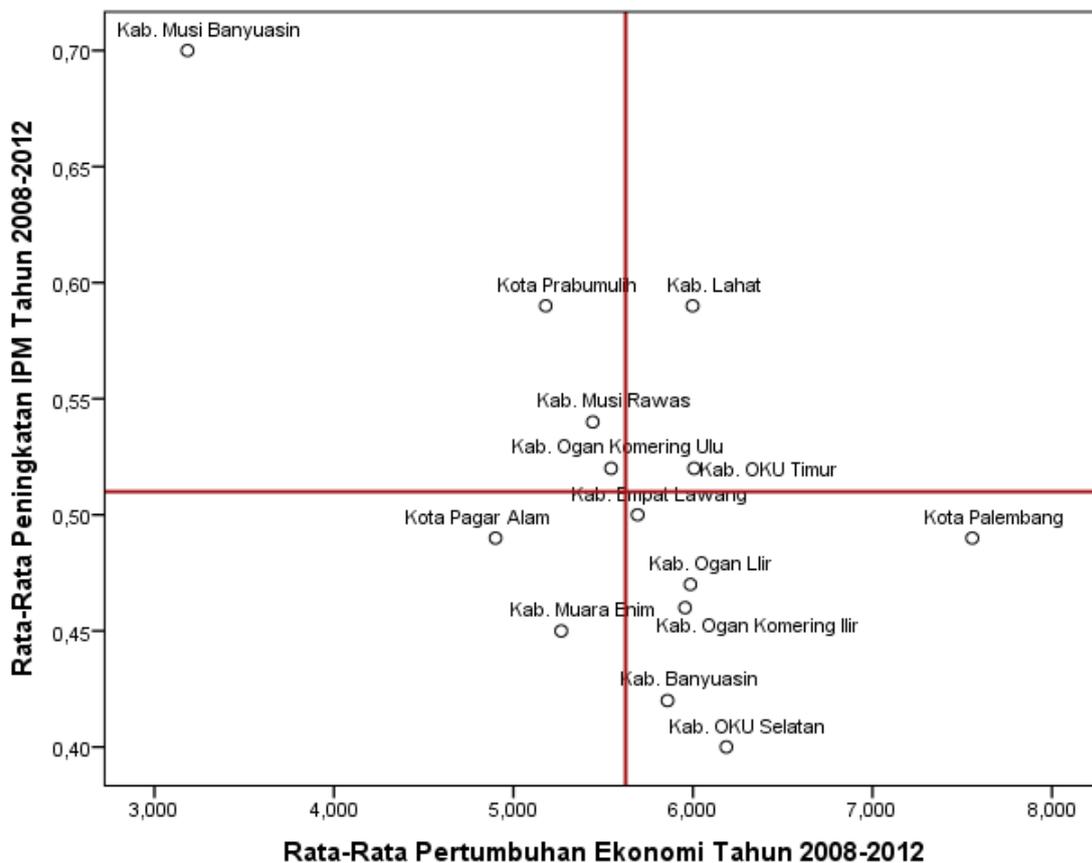
Keempat, Kota Palembang terletak di kuadran IV dengan rata-rata pertumbuhan tinggi di atas rata-rata, tapi pengurangan kemiskinan di bawah rata-rata (*high-growth, less-pro poor*). Kondisi ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi di daerah tersebut belum memberi dampak penurunan angka kemiskinan secara nyata. Tantangan yang harus dihadapi oleh pemerintah daerah

adalah mendorong pengembangan sektor dan kegiatan ekonomi yang menyerap tenaga kerja relatif tinggi seperti pertanian dan perkebunan, serta usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi. Tantangan lainnya adalah meningkatkan koordinasi sinergi dalam mengoptimalkan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.

3. Pertumbuhan Ekonomi dan Peningkatan IPM

Distribusi kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan menurut rata-rata pertumbuhan ekonomi dan peningkatan IPM selama tahun 2008-2012 adalah sebagai berikut (Gambar 7). *Pertama*, Kabupaten Lahat dan OKU Timur termasuk daerah dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi dan peningkatan IPM di atas rata-rata provinsi. Kondisi ini menyiratkan bahwa pertumbuhan ekonomi sejalan dengan peningkatan IPM (*pro-growth, pro-human development*). Dengan kinerja yang baik ini, tantangan yang dihadapi oleh pemerintah daerah adalah menjaga momentum pertumbuhan dengan tetap meningkatkan produktivitas dan nilai tambah, dan sekaligus mempertahankan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik di bidang pendidikan dan kesehatan.

Gambar 7
Dampak Pertumbuhan Ekonomi terhadap Peningkatan IPM 2008-2012



Sumber: BPS, 2012 (diolah)

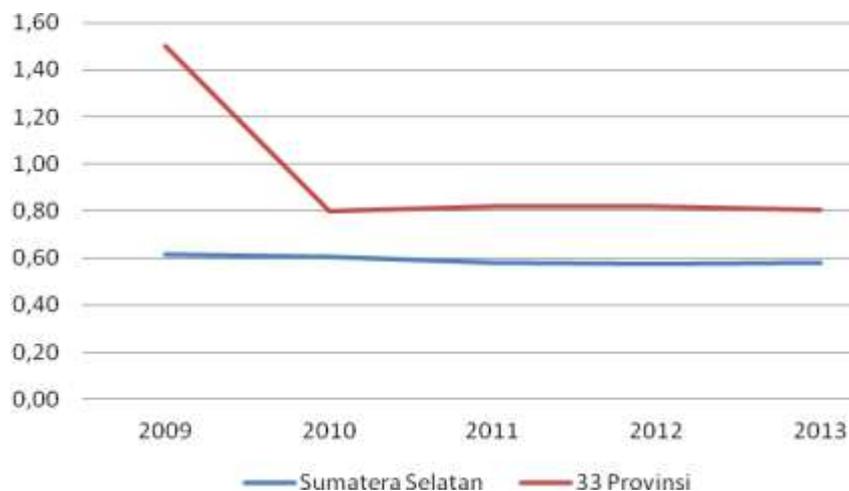
Kedua, Kabupaten Musi Banyuasin, Musi Rawas, Ogan Komering Ulu, dan Kota Prabumulih yang terletak di kuadran II termasuk kategori daerah dengan pertumbuhan ekonomi di bawah rata-rata, tapi peningkatan IPM di atas rata-rata (*low growth, pro-human development*). Hal ini mengindikasikan bahwa berbagai kebijakan dan program pembangunan untuk meningkatkan pelayanan publik dapat meningkatkan IPM. Tantangan yang harus diatasi adalah mendorong percepatan pembangunan ekonomi melalui peningkatan produktivitas dan nilai tambah sektor dan kegiatan ekonomi yang menggunakan sumber daya lokal seperti pertanian, perkebunan, kelautan dan perikanan.

Ketiga, Kabupaten Muara Enim dan Kota Pagar Alam terletak di kuadran III dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi dan peningkatan IPM di bawah rata-rata provinsi (*low growth, less pro-human development*). Kondisi ini menegaskan perlunya pemerintah daerah membenahi pelayanan publik di bidang pendidikan dan kesehatan. Selain itu, pemerintah daerah juga harus bekerja keras mendorong seluruh SKPD untuk memacu pembangunan ekonomi dengan meningkatkan produktivitas dan nilai tambah sektor dan kegiatan utama daerah. *Keempat*, Kabupaten Kabupaten Empat Lawang, Ogan Ilir, Ogan Komering Ilir, Banyuasin, OKU Selatan dan Kota Palembang terletak di kuadran IV dengan rata-rata pertumbuhan tinggi di atas rata-rata, tapi peningkatan IPM di bawah rata-rata (*high-growth, less-pro human development*). Tantangan bagi pemerintah daerah adalah menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan peningkatan mutu pelayanan publik terutama di bidang pendidikan dan kesehatan.

4. Kesenjangan Ekonomi

Tingkat kesenjangan ekonomi antarkota dan kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan yang ditunjukkan dengan nilai *indeks williamson* dari tahun 2009-2013 cukup tinggi. Kesenjangan ekonomi di Provinsi Selatan masih berada di bawah nasional dengan kecenderungan semakin meningkat.

Gambar 8
Perkembangan Kesenjangan Ekonomi (Indeks Williamson) 2009-2013



Sumber: BPS, 2012 (diolah)

Tabel 1
Perkembangan Nilai PDRB Perkapita ADHB dengan Migas Kabupaten/ Kota di Sumatera Selatan 2007-2012 (000/jiwa)

| Kab. Kota | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|---------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ogan Komering Ulu | 14.062 | 16.176 | 16.263 | 17.899 | 20.278 | 22.785 |
| Ogan Komering Ilir | 6.982 | 7.934 | 8.608 | 9.523 | 10.791 | 12.091 |
| Muara Enim | 21.792 | 25.951 | 25.451 | 28.371 | 31.932 | 35.116 |
| Lahat | 11.135 | 12.972 | 13.710 | 15.442 | 17.517 | 19.661 |
| Musi Rawas | 10.868 | 12.782 | 13.039 | 14.634 | 16.546 | 18.331 |
| Musi Banyu Asin | 42.560 | 49.348 | 46.039 | 49.504 | 55.220 | 59.085 |
| Banyuasin | 11.379 | 13.565 | 14.057 | 15.857 | 17.668 | 17.450 |
| Ogan Komering Ulu Selatan | 6.160 | 7.113 | 8.232 | 9.457 | 10.737 | 12.274 |
| Ogan Komering Ulu Timur | 6.209 | 7.198 | 7.866 | 8.836 | 10.024 | 11.227 |
| Ogan Ilir | 6.976 | 7.914 | 8.635 | 9.788 | 11.184 | 12.676 |
| Empat Lawang | 6.634 | 7.655 | 8.441 | 9.443 | 10.490 | 11.772 |
| Kota Palembang | 24.854 | 30.023 | 31.756 | 35.706 | 39.572 | 44.952 |
| Kota Prabumulih | 14.116 | 16.387 | 16.434 | 18.130 | 20.814 | 22.949 |
| Kota Pagar Alam | 7.218 | 8.319 | 9.001 | 10.068 | 11.217 | 12.858 |
| Kota Lubuk Linggau | 7.730 | 8.563 | 9.470 | 10.548 | 11.957 | 13.414 |
| Sumatera Selatan | 15.541 | 18.565 | 18.710 | 21.080 | 24.061 | 26.791 |

Sumber: BPS, 2013

Kesenjangan ekonomi di Sumatera Selatan dikarenakan masih terbatasnya jangkauan sarana dan prasarana bagi masyarakat terutama yang tinggal jauh dari perkotaan. Tantangan yang harus dihadapi adalah meningkatkan, pemeratakan, dan memperluas jangkauan dan mutu pelayanan kesehatan, pendidikan, dan pelayanan sosial lainnya, serta jangkauan informasi sampai ke seluruh pelosok daerah. Kesenjangan ekonomi antarkota dan kabupaten di Sumatera Selatan terlihat dari besarnya gap antara kabupaten atau kota dengan PDRB perkapita tertinggi dan PDRB perkapita terendah. Nilai PDRB Perkapita tertinggi di Provinsi Sumatera Selatan adalah Kabupaten Musi Banyuasin, Kota Palembang, dan Muara Enim (Tabel 1). Kabupaten Musi Banyuasin dan Muara Enim memiliki pendapatan perkapita tinggi karena didukung oleh potensi sumberdaya alam di bidang pertambangan yang mampu meningkatkan PDRB wilayah. Sementara itu Kota Palembang juga memiliki PDRB perkapita tinggi karena didukung oleh infrastruktur yang lengkap sebagai ibukota Provinsi Sumatera Selatan.

B. Penyebab Permasalahan Pembangunan

1. Tingginya Ketergantungan pada Sektor Primer

Struktur perekonomian Sumatera Selatan tahun 2013 didominasi oleh sektor-sektor primer khususnya pertanian dan pertambangan. Sektor industri pengolahan juga dominan bagi pembentukan PDRB Sumatera Selatan. Dalam sektor sektor industri pengolahan, pangsa industri pengolahan migas hampir sama dengan industri pengolahan nonmigas. Fakta ini menunjukkan relatif terbatasnya rantai pembentukan nilai tambah di daerah. Dengan kata lain, sebagian besar produk daerah masih berupa bahan mentah yang belum diolah. Struktur ekonomi seperti ini menyiratkan masih terbatasnya produktivitas pekerja dalam menciptakan nilai tambah bagi perekonomian rendah.

Tabel 2
Struktur PDRB Menurut Lapangan Usaha 2013

| No. | Lapangan Usaha | Distribusi Persentase (%) | |
|------------|------------------------------|---------------------------|----------------|
| | | PDRB ADHB | PDRB ADHK 2000 |
| 1. | Pertanian | 16,28 | 18,99 |
| 2. | Pertambangan | 20,06 | 19,46 |
| 3. | Industri Pengolahan | 19,96 | 16,94 |
| 4. | Listrik, Gas, Air Minum | 0,50 | 0,52 |
| 5. | Konstruksi | 8,36 | 9,08 |
| 6. | Perdagangan, Hotel, Restoran | 14,27 | 14,94 |
| 7. | Angkutan, Telekomunikasi | 5,17 | 6,57 |
| 8. | Keuangan | 3,87 | 4,59 |
| 9. | Jasa-jasa | 11,54 | 8,92 |
| Total PDRB | | 100.00 | 100.00 |

Sumber: BPS, 2013

Ketergantungan pada komoditas primer paling tidak memiliki dua risiko. Pertama, harga komoditas primer di pasar internasional cenderung bergejolak dalam beberapa tahun ini. Ketidakstabilan harga ini lebih banyak merugikan produsen, khususnya petani, peternak, pekebun, dan nelayan. Ketika harga komoditas naik, keuntungan terbesar biasanya dinikmati oleh pedagang perantara. Sementara ketika harga komoditas jatuh, beban terbesar ditanggung oleh petani. Kedua, permintaan terhadap komoditas pertanian khususnya pangan relatif inelastis, dan sebaliknya pada produk manufaktur. Ketika saat ini kawasan Asia termasuk Indonesia tengah tumbuh relatif tinggi dan menciptakan banyak warga kelas menengah baru, permintaan terhadap bahan pangan tidak akan naik secara proporsional dengan peningkatan pendapatan. Peningkatan pendapatan akan mendorong konsumsi barang-barang non pangan, seperti produk elektronik, perumahan, kendaraan, dan lain-lain. Oleh karena itu, perekonomian yang terlalu bertumpu pada sektor primer khususnya pertanian berisiko mengalami pada pertumbuhan lambat atau sedang.

Dari segi penyerapan tenaga kerja, lapangan kerja yang banyak menyerap tenaga kerja adalah sektor perdagangan dan jasa-jasa. Selama periode 2010 – 2014 ,

pertambahan jumlah orang bekerja di sektor tersier lebih besar dibandingkan sektor lainnya. Perubahan jumlah orang yang bekerja pada sektor pertanian dan pertambangan juga bertambah namun penambahan tenaga kerja tanpa diimbangi dengan peningkatan skala usaha dan produktivitas akan menghambat peningkatan pendapatan petani dan buruh tani dan memperlambat pengurangan kemiskinan. Tantangan yang harus dihadapi adalah peningkatan produktivitas pertanian dan pengembangan industri pengolahan berbasis pertanian.

Tabel 3
Perubahan Jumlah Orang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan 2010-2014

| No. | Lapangan Pekerjaan | 2010 | 2014 (Feb) | Perubahan |
|-----|------------------------------|-----------|------------|-----------|
| 1 | Pertanian | 2.013.885 | 2.021.373 | 7.488 |
| 2 | Pertambangan | 33.666 | 79.081 | 45.415 |
| 3 | Industri Pengolahan | 132.326 | 179.676 | 47.350 |
| 4 | Listrik, Gas, Air | 5.430 | 4.514 | (916) |
| 5 | Bangunan | 113.882 | 198.290 | 84.408 |
| 6 | Perdagangan, Hotel, Restoran | 515.524 | 670.762 | 155.238 |
| 7 | Angkutan & Telekomunikasi | 158.368 | 161.373 | 3.005 |
| 8 | Keuangan | 35.887 | 70.166 | 34.279 |
| 9 | Jasa-Jasa | 373.091 | 482.436 | 109.345 |
| | Total | 3.382.059 | 3.867.671 | 485.612 |

Sumber: BPS, 2014

Sektor-sektor industri potensial daerah di antaranya industri makanan dan minuman, industri barang kayu dan hasil hutan, industri pupuk dan karet. Industri-industri ini bersama sektor-sektor tradisional perkebunan, kehutanan, dan perikanan menjadi sektor basis perekonomian Sumatera Selatan (Tabel 4). Di sisi lain peranan sektor migas meskipun masih besar cenderung menurun, baik dari sisi pangsa maupun sumber pertumbuhan.

Tabel 4
Nilai LQ Sektor Perekonomian Sumatera Selatan 2008-2012

| Lapangan Usaha | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|--|------|------|------|------|------|
| 1. Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan | 1,46 | 1,45 | 1,48 | 1,51 | 1,53 |
| a. Tanaman Bahan Makanan | 0,70 | 0,70 | 0,72 | 0,72 | 0,72 |
| b. Tanaman Perkebunan | 4,34 | 4,41 | 4,51 | 4,59 | 4,63 |
| c. Peternakan | 0,87 | 0,89 | 0,91 | 0,93 | 0,96 |
| d. Kehutanan | 2,00 | 1,92 | 1,86 | 1,85 | 1,85 |
| e. Perikanan | 1,25 | 1,25 | 1,27 | 1,28 | 1,28 |
| 2. Pertambangan dan Pengalihan | 2,83 | 2,77 | 2,75 | 2,78 | 2,76 |
| a. Pertambangan Minyak dan Gas Bumi | 4,22 | 4,27 | 4,30 | 4,37 | 4,46 |
| b. Pertambangan Bukan Migas | 1,02 | 0,97 | 1,04 | 1,13 | 1,17 |
| c. Pengalihan | 1,43 | 1,40 | 1,38 | 1,35 | 1,35 |
| 3. Industri Pengolahan | 0,65 | 0,65 | 0,66 | 0,65 | 0,66 |

| Lapangan Usaha | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|---|------|------|------|------|------|
| a. Industri Migas | 1,59 | 1,64 | 1,64 | 1,66 | 1,70 |
| 1). Pengilangan Minyak Bumi | 3,62 | 3,65 | 3,63 | 3,63 | 3,68 |
| 2). Gas Alam Cair (LNG) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b. Industri Bukan Migas | 0,56 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,58 |
| 4. Listrik, Gas & Air Bersih | 0,67 | 0,62 | 0,63 | 0,65 | 0,67 |
| a. Listrik | 0,83 | 0,80 | 0,82 | 0,82 | 0,82 |
| b. Gas | 0,11 | 0,08 | 0,08 | 0,09 | 0,09 |
| c. Air Bersih | 0,83 | 0,87 | 0,87 | 0,91 | 0,94 |
| 5. Konstruksi | 1,21 | 1,22 | 1,24 | 1,32 | 1,35 |
| 6. Perdagangan, Hotel & Restoran | 0,80 | 0,82 | 0,81 | 0,80 | 0,81 |
| a. Perdagangan Besar dan Eceran | 0,87 | 0,90 | 0,89 | 0,87 | 0,88 |
| b. Hotel | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,17 | 0,16 |
| c. Restoran | 0,50 | 0,49 | 0,51 | 0,55 | 0,57 |
| 7. Pengangkutan dan Komunikasi | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,63 | 0,63 |
| a. Pengangkutan | 0,82 | 0,83 | 0,84 | 0,84 | 0,87 |
| 1). Angkutan Rel | 3,98 | 3,73 | 3,75 | 4,08 | 4,68 |
| 2). Angkutan Jalan Raya | 1,02 | 1,05 | 1,09 | 1,10 | 1,15 |
| 3). Angkutan Laut | 0,93 | 0,95 | 0,99 | 0,98 | 0,96 |
| 4). Angkutan Sungai, Danau & Penyeberangan | 0,78 | 0,80 | 0,78 | 0,76 | 0,76 |
| 5). Angkutan Udara | 0,60 | 0,61 | 0,58 | 0,57 | 0,58 |
| 6). Jasa Penunjang Angkutan | 0,42 | 0,43 | 0,44 | 0,45 | 0,47 |
| b. Komunikasi | 0,47 | 0,46 | 0,47 | 0,49 | 0,50 |
| 8. Keuangan, Real Estate & Jasa Perusahaan | 0,43 | 0,44 | 0,45 | 0,46 | 0,46 |
| a. Bank | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| b. Lembaga Keuangan Tanpa Bank | 0,07 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| c. Jasa Penunjang Keuangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| d. Real Estat | 1,15 | 1,17 | 1,20 | 1,22 | 1,26 |
| e. Jasa Perusahaan | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,25 | 0,25 |
| 9. Jasa-jasa | 0,87 | 0,90 | 0,92 | 0,92 | 0,94 |
| a. Pemerintahan Umum | 1,17 | 1,21 | 1,24 | 1,26 | 1,33 |
| b. Swasta | 0,64 | 0,66 | 0,67 | 0,67 | 0,68 |
| 1). Jasa Sosial Masyarakat | 1,05 | 1,12 | 1,13 | 1,13 | 1,14 |
| 2). Jasa Hiburan dan Rekreasi | 0,09 | 0,08 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| 3). Jasa Perorangan dan Rumah tangga | 0,54 | 0,56 | 0,57 | 0,57 | 0,58 |

Catatan: LQ dihitung dengan menggunakan PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000

Sumber: BPS, 2012 (diolah)

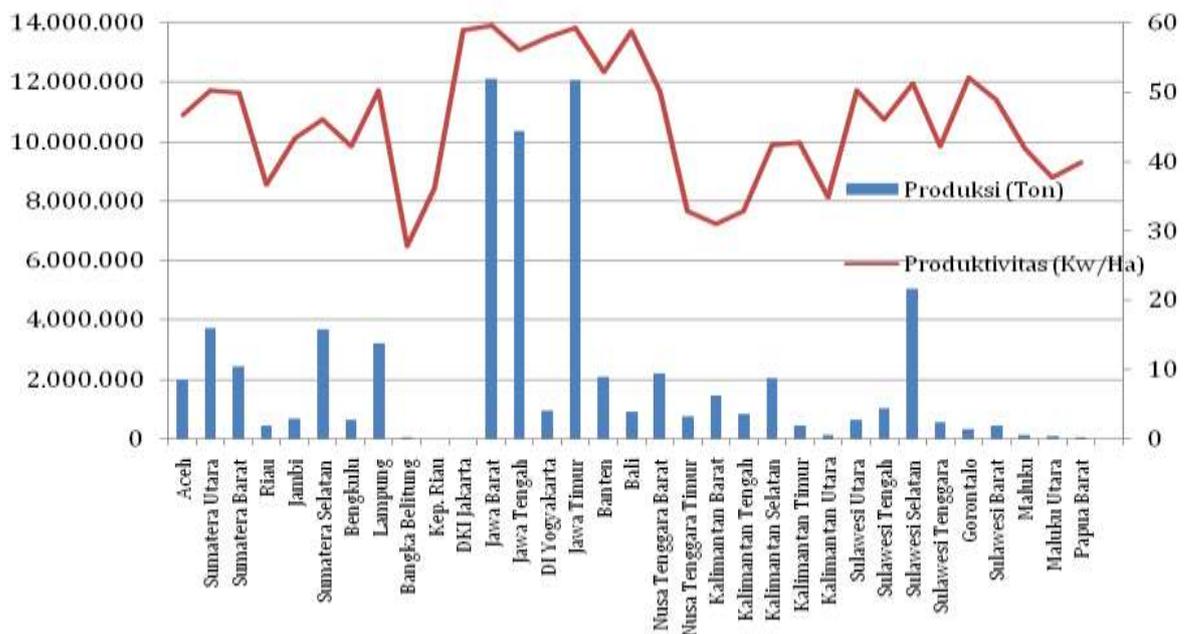
Sektor riil non migas menunjukkan pemulihan kinerja pertumbuhan setelah melambat karena dampak krisis global 2008/2009. Sektor-sektor industri pengolahan dan konstruksi kembali tumbuh relatif tinggi. Sementara itu sektor perdagangan dan keuangan juga mengalami pertumbuhan pesat, yang menggambarkan potensi Sumatera Selatan sebagai salah satu hub wilayah Sumatera. Semua hal ini

menunjukkan perekonomian lokal memiliki potensi perkembangan yang menjanjikan.

2. Masih Rendahnya Produktivitas Sektor Pertanian

Salah satu peran penting Sumatera Selatan bagi perekonomian wilayah dan nasional adalah sebagai lumbung pangan. Produksi padi daerah ini memiliki surplus yang berpotensi mendukung ketahanan pangan wilayah. Secara nasional Sumatera Selatan merupakan penghasil padi terbesar keenam dengan produksi mencapai 3,67 juta ton padi kering giling pada tahun 2013 (Gambar 9).

Gambar 9
Produksi dan Produktivitas Padi Menurut Provinsi 2013



Sumber: BPS, 2013

Dengan asumsi faktor konversi padi ke beras sebesar 62,74 persen, dan tingkat konsumsi beras per kapita 139,15 kg per tahun, maka Sumatera Selatan berpotensi memiliki surplus beras sebesar 1,22 juta ton. Angka ini cukup signifikan untuk mendukung target surplus beras nasional sebesar 10 juta ton beras per tahun. Walaupun memiliki potensi surplus beras namun produktivitas padi Sumatera Selatan rendah. Pada tahun 2013 produktivitas padi di Sumatera Selatan mencapai 45,96 Kw/Ha. Angka ini jauh tertinggal dari tingkat produktitas Jawa Timur yang hampir mencapai 60 kwintal per hektar.

Mengingat masih besarnya peran sektor pertanian baik dalam pembentukan nilai tambah maupun penyediaan lapangan kerja, maka peningkatan produktivitas di sektor pertanian berpotensi meningkatkan kinerja pertumbuhan daerah, kesejahteraan rakyat, dan peran daerah dalam ketahanan pangan nasional.

3. Tingginya Peran Konsumsi Sebagai Sumber Pertumbuhan Ekonomi

Dari sisi penggunaan, pendorong utama pertumbuhan Sumatera Selatan adalah konsumsi rumah tangga. Pangsa konsumsi rumah tangga dalam PDRB mencapai 64,28 persen pada tahun 2013 yang disusul oleh ekspor impor masing masing sebesar 40,04 persen dan 44,22 persen (Tabel 5). Sementara itu kontribusi investasi (pembentukan modal tetap bruto) mencapai 27,58 persen pada tahun 2013. Kondisi ini tidak menjanjikan pertumbuhan tinggi yang berkelanjutan. Konsumsi meskipun menyelamatkan perekonomian domestik selama krisis global 2008/2009, tetapi tidak bisa diandalkan sebagai mesin pendorong pertumbuhan daerah dalam jangka panjang. Pertumbuhan yang bertumpu pada konsumsi akan menggerus potensi tabungan masyarakat. Pertumbuhan tinggi memerlukan penambahan stok kapital untuk menunjang produksi di sektor riil. Oleh karena itu peran investasi dalam perekonomian perlu ditingkatkan.

Tabel 5
Struktur PDRB Menurut Penggunaan 2013

| No. | Lapangan Usaha | Distribusi Persentase (%) | |
|-----|--------------------------|---------------------------|----------------|
| | | PDRB ADHB | PDRB ADHK 2000 |
| 1. | Konsumsi Rumah Tangga | 64,28 | 44,62 |
| 2. | Konsumsi Lembaga Nirlaba | 1,10 | 30,66 |
| 3. | Konsumsi Pemerintah | 10,46 | 6,30 |
| 4. | PMTB | 27,58 | 18,99 |
| 5. | Perubahan Stok | 0,75 | 0,75 |
| 6. | Ekspor | 40,04 | 30,66 |
| 7. | Impor | 44,22 | 31,98 |
| | | 100,00 | 100,00 |

Sumber: BPS, 2013

Investasi sangat penting sebagai sumber utama pertumbuhan ekonomi daerah. Tantangan bagi pemerintah daerah adalah peningkatan iklim investasi dan iklim usaha yang kondusif di daerah. Mengingat pentingnya investasi bagi pertumbuhan ekonomi daerah, hal yang perlu diperhatikan adalah kelembagaan yang ramah dunia usaha. Salah satu indikatornya adalah kemudahan pelayanan perijinan. Dalam hal ini meski semua kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan telah memiliki Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), namun masih perlu dipastikan bahwa implemmentasi PTSP tersebut dapat meningkatkan efisiensi proses perijinan, baik dalam hal biaya maupun waktu yang dibutuhkan.

Sumber pertumbuhan lain yang potensial adalah ekspor. Namun demikian meskipun perannya cukup besar dalam perekonomian daerah, ekspor Sumatera Selatan mengalami pertumbuhan negatif pada tahun 2009. Hal ini berkaitan dengan pelambatan arus perdagangan dan pelemahan permintaan komoditas di pasar global selama krisis global 2008/2009. Komoditas andalan ekspor daerah seperti migas, sawit, karet, kopi dan batubara tak luput dari dampak negatif krisis global tersebut.

4. Terbatasnya Infrastruktur Wilayah dalam Mendukung Sistem Logistik yang Efisien

Dalam pengembangan wilayah Sumatera, posisi Sumatera Selatan sangat strategis. Sebagai salah satu pusat penghubung (hub) utama di wilayah Sumatera selain Medan, Palembang hampir memiliki semua prasarana perhubungan utama, seperti jaringan jalan (jalan lintas timur dan jalur lintas tengah), pelabuhan, dan bandara. Dengan jumlah penduduk yang relatif besar, Sumatera Selatan khususnya Palembang berpotensi menjadi *powerhouse* perekonomian wilayah dengan syarat harus ada penguatan keterkaitan wilayah untuk mendorong aglomerasi ekonomi wilayah. Salah satu penghambat terwujudnya potensi ini adalah buruknya kualitas infrastruktur yang memfasilitasi pemusatan dan penyebaran kegiatan ekonomi secara alami. Defisiensi infrastruktur baik secara kuantitas maupun kualitas akan menghambat distribusi barang secara efisien, yang merupakan salah satu pilar utama daya saing wilayah.

Tabel 6
Kerapatan Jalan dan PDRB Per Kapita Provinsi Tahun 2012

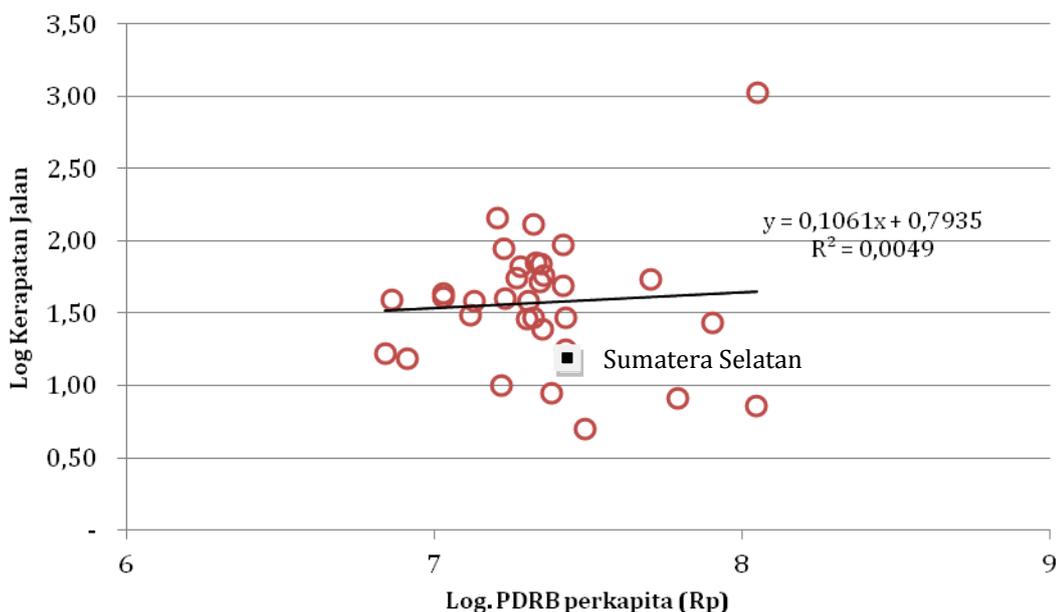
| No | Provinsi | PDRB per kapita (Ribu Rp) | Kerapatan Jalan |
|-----------|-------------------------|------------------------------|--------------------|
| 1 | DKI Jakarta | 111.913 | 1.068,36 |
| 2 | DIY | 16.054 | 146,56 |
| 3 | Bali | 20.948 | 130,28 |
| 4 | Jawa Timur | 26.274 | 95,37 |
| 5 | Jawa Tengah | 16.864 | 88,75 |
| 6 | Jawa Barat | 21.274 | 72,08 |
| 7 | Sulawesi Selatan | 22.151 | 69,68 |
| 8 | Banten | 19.038 | 66,81 |
| 9 | Sulawesi Utara | 22.624 | 57,89 |
| 10 | Lampung | 18.460 | 56,44 |
| 11 | Kep. Riau | 50.174 | 54,95 |
| 12 | Sumatera Barat | 22.035 | 52,36 |
| 13 | Sumatera Utara | 26.185 | 49,50 |
| 14 | NTB | 10.691 | 43,55 |
| 15 | Gorontalo | 10.703 | 40,85 |
| 16 | Sulawesi Barat | 17.012 | 40,62 |
| 17 | NTT | 7.236 | 39,95 |
| 18 | Bengkulu | 13.522 | 38,99 |
| 19 | Aceh | 20.164 | 38,76 |
| 20 | Sulawesi Tenggara | 13.112 | 30,71 |
| 21 | Kep. Bangka Belitung | 26.784 | 29,93 |
| 22 | Sulawesi Tengah | 21.052 | 29,73 |
| 23 | Kalimantan Selatan | 20.051 | 29,28 |
| 24 | Riau | 79.786 | 27,25 |
| 25 | Jambi | 22.508 | 24,81 |
| 26 | Sumatera Selatan | 26.742 | 17,86 |
| 27 | Maluku Utara | 6.929 | 16,72 |
| 28 | Maluku | 8.134 | 15,39 |
| 19 | Kalimantan Barat | 16.421 | 10,00 |

| No | Provinsi | PDRB per kapita (Ribu Rp) | Kerapatan Jalan |
|----|-------------------|------------------------------|--------------------|
| 30 | Kalimantan Tengah | 23.987 | 8,96 |
| 31 | Papua Barat | 61.462 | 8,24 |
| 32 | Kalimantan Timur | 111.210 | 7,22 |
| 33 | Papua | 30.713 | 5,06 |
| | Indonesia | 33.531 | 25,99 |

Sumber: BPS (2012), Statistik Kementerian PU (2013)

Dari sisi kuantitas, jaringan jalan di Sumatera Selatan tergolong rendah. Kerapatan jalan wilayah yang merupakan rasio antara panjang jalan dan luas wilayah masih lebih rendah dari kerapatan jalan nasional berada pada urutan 26 provinsi di Indonesia (Tabel 6). Dengan membandingkan kerapatan jalan Sumatera Selatan dengan kerapatan jalan di provinsi lain dengan tingkat pendapatan per kapita yang selama setahun, diperoleh gambaran bahwa Sumatera Selatan seharusnya memiliki kerapatan lebih tinggi dari 17,86 (Gambar 10). Setiap kilometer persegi luas wilayah Sumatera Selatan hanya terdapat 178,57 meter jalan sehingga tingkat kerapatan jalan Sumatera Selatan tertinggal dari provinsi-provinsi dengan pendapatan per kapita yang sama. Tantangan yang harus dihadapi adalah percepatan pembangunan infrastruktur untuk mendukung keterkaitan antarwilayah.

Gambar 10
Hubungan antara Kerapatan Jalan dan GDP Per Kapita Tahun 2012



Sumber: BPS (2013), Statistik Kementerian PU (2013)-diolah

Secara kualitas, defisiensi jalan di Sumatera Selatan semakin terlihat. Dari total 15 ribuan kilometer jaringan jalan di Sumatera Selatan ternyata masih 45 persen belum beraspal. Jika dilihat dari kondisi permukaannya, maka hanya 38 persen jalan wilayah yang berada dalam kondisi baik. Sisanya 19 persen dalam kondisi sedang, dan

43 persen dalam kondisi rusak. Kondisi jaringan jalan semacam ini tentu mengakibatkan bertambahnya waktu tempuh distribusi barang, mempercepat kerusakan armada transportasi, dan meningkatkan risiko kerusakan komoditas selama pengiriman, dan sebagai akibatnya biaya distribusi menjadi tinggi.

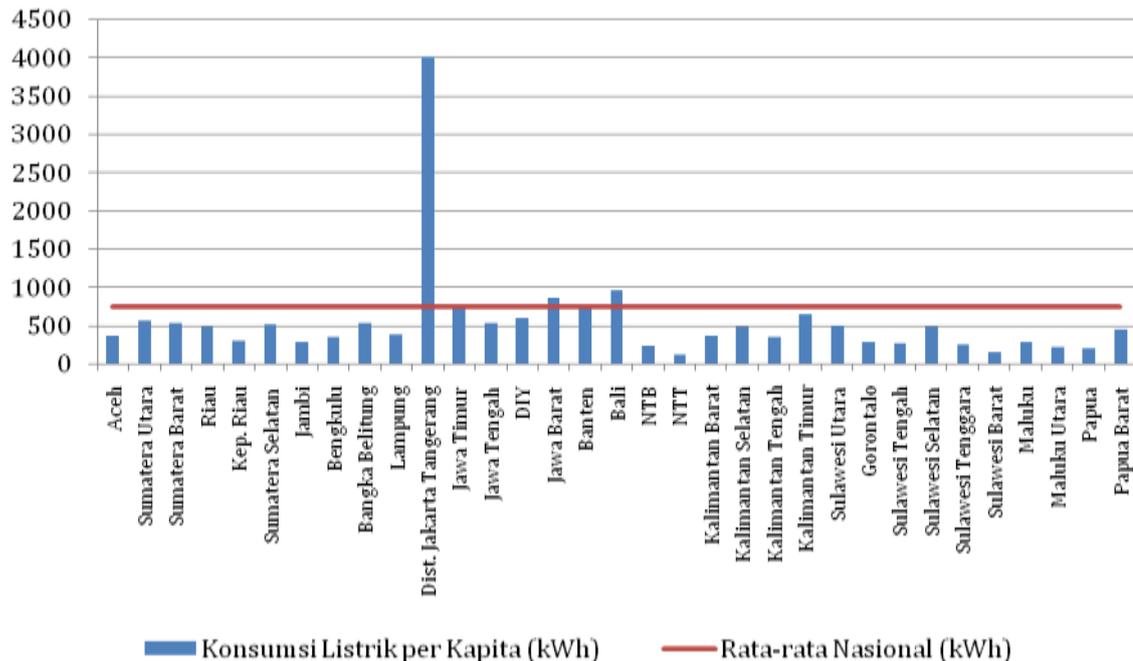
Tabel 7
Jalan Menurut Jenis Permukaan 2012

| PROVINSI | JENIS PERMUKAAN JALAN | | | | | | | | Total | |
|------------------|-----------------------|----|---------|----|--------|----|---------|---|---------|-----|
| | Aspal | | Kerikil | | Tanah | | Lainnya | | | |
| | Km | % | Km | % | Km | % | Km | % | Km | % |
| Sumatera Selatan | 8.342 | 55 | 2.741 | 18 | 3.605 | 24 | 364 | 2 | 15.052 | 100 |
| Sumatera | 74.399 | 50 | 30.509 | 20 | 39.739 | 27 | 5.258 | 4 | 149.905 | 100 |
| INDONESIA | 258.743 | 59 | 72.934 | 17 | 91.444 | 21 | 14.638 | 3 | 437.759 | 100 |

Sumber: BPS, 2012

Dengan kapasitas fiskal yang berbeda, Pemerintah Kabupaten/Kota mengalami kesulitan untuk meningkatkan panjang dan kualitas jalan. Oleh sebab itu, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota perlu bekerjasama dalam meningkatkan kuantitas dan kualitas jalan terkait dengan keragaman kapasitas fiskal antardaerah.

Gambar 11
Konsumsi Listrik per Kapita (kWh) Tahun 2013

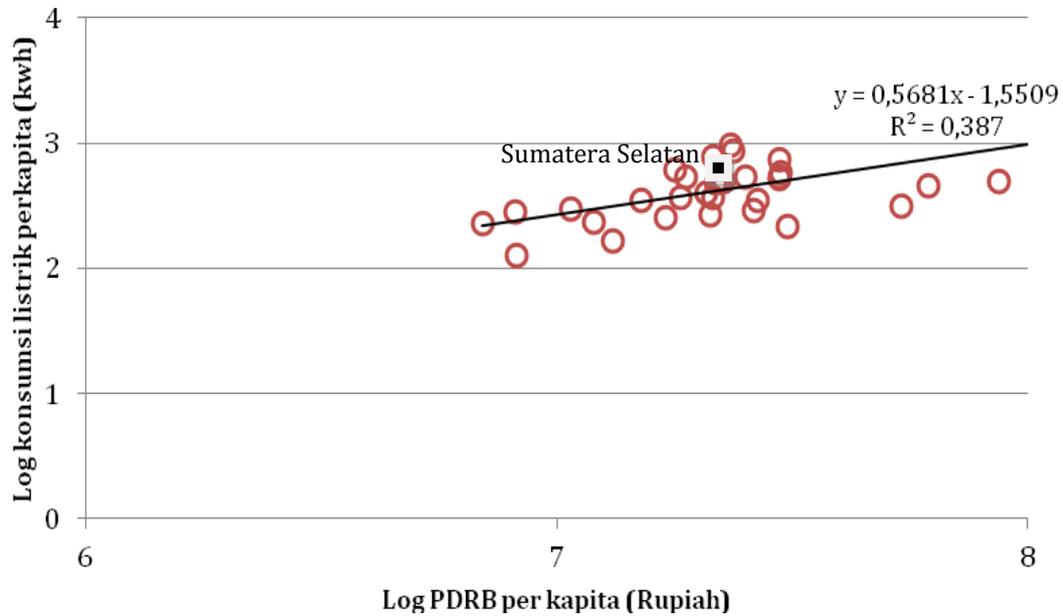


Sumber: Statistik PLN, 2013

Infrastruktur yang tidak kalah pentingnya bagi percepatan pembangunan wilayah adalah pembangkit dan jaringan listrik untuk memfasilitasi berkembangnya industrialisasi. Konsumsi listrik di Sumatera Selatan termasuk rendah dan kurang dari rata-rata tingkat konsumsi listrik nasional sebesar 753,7 kWh (Gambar 11), namun

apabila dibandingkan dengan provinsi lain melalui hubungan tingkat pendapatan perkapita dan konsumsi listrik perkapita, Sumatera Selatan tidak mengalami defisiensi infrastuktur listrik (Gambar 12).

Gambar 12
Hubungan Konsumsi Listrik dan Pendapatan Tahun 2013



Sumber: BPS (2013), Statistik PLN (2013) - diolah

5. Kualitas Sumber Daya Manusia

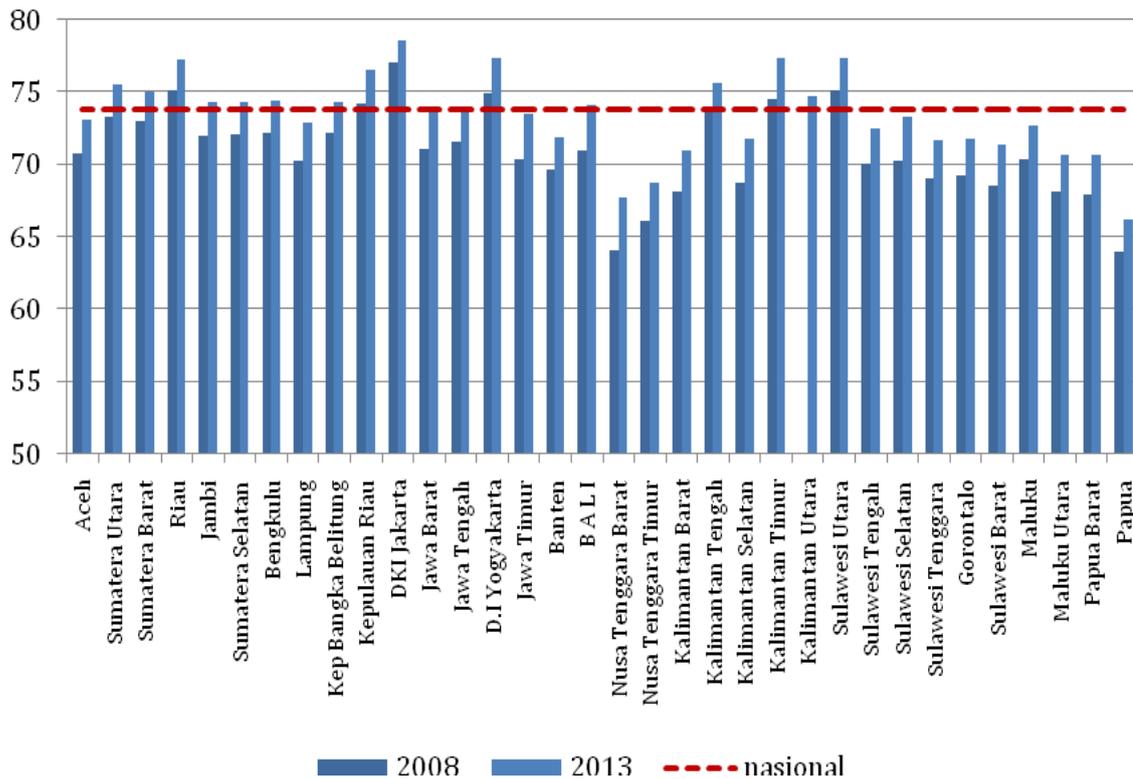
Faktor kualitas sumber daya manusia tidak bisa diabaikan dalam percepatan pertumbuhan daerah. Peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan salah satu transmisi kemajuan teknologi dalam suatu perekonomian. Kemajuan teknologi inilah yang menjadi penentu keberlanjutan pertumbuhan dalam jangka panjang. Dilihat dari indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM), capaian pembangunan sumber daya manusia Sumatera Selatan cukup baik. Angka IPM pada tahun 2013 berada pada peringkat 12 nasional dengan nilai IPM 74,36 (Gambar 13). Rata-rata lama sekolah di Sumatera Selatan meningkat dari 7,6 tahun pada tahun 2008 menjadi 8,04 tahun pada tahun 2013. Pada indikator angka harapan hidup terjadi peningkatan dari 69,2 tahun pada tahun 2008 menjadi 70,1 tahun pada tahun 2013.

Dampak rendahnya kualitas sumber daya manusia di bidang pendidikan terhadap perekonomian daerah salah satunya tercermin dari kualitas angkatan kerja daerah. Dalam hal ini, porsi angkatan kerja dengan jenjang pendidikan yang ditamatkan setara minimal SMA di Sumatera Selatan termasuk rendah. Ketersediaan angkatan kerja terdidik dalam porsi yang memadai akan menjadi salah satu pemicu pertumbuhan wilayah melalui proses spesialisasi dan aglomerasi. Investor cenderung memilih lokasi di daerah di mana lebih mudah menemukan tenaga kerja terampil.

Capaian indikator sosial di Sumatera Selatan ini menimbulkan persoalan kesenjangan kualitas sumber daya manusia antarkabupaten/kota. Hal ini

menyiratkan kesenjangan pembangunan SDM antara daerah perkotaan dan perdesaan. Permasalahan keteringgalan pembangunan SDM daerah berkaitan dengan perlunya pembangunan kesehatan dan pendidikan. Hal ini menegaskan perlunya memacu peningkatan akses pelayanan kesehatan dan pendidikan menengah secara merata di seluruh daerah.

Gambar 13
Nilai IPM Provinsi di Indonesia Tahun 2008 dan 2013

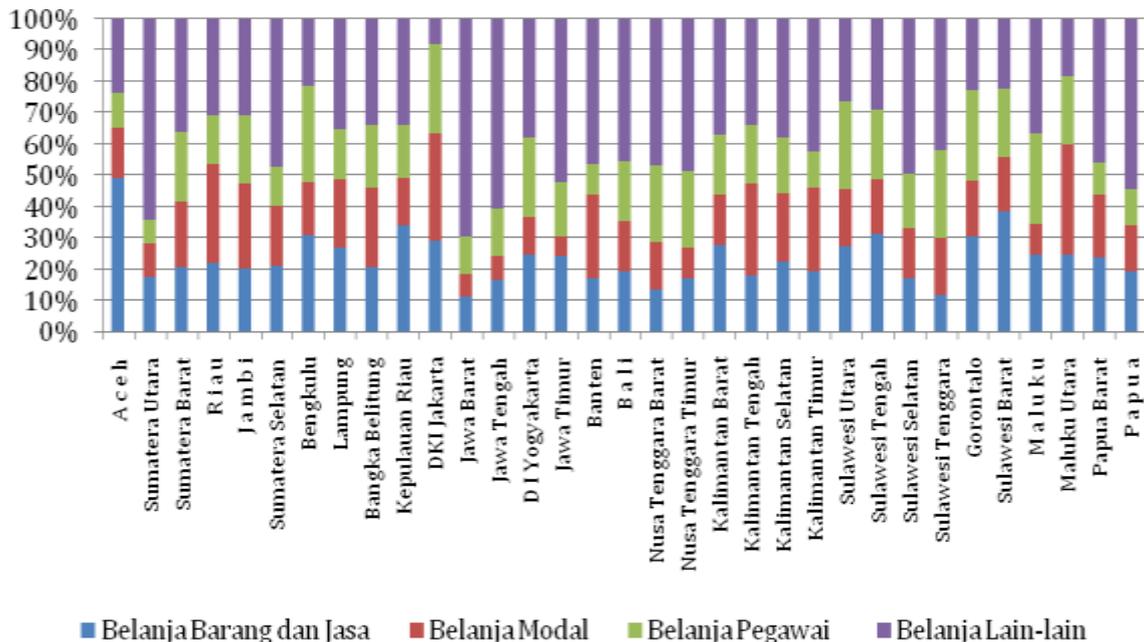


Sumber: BPS, 2013

6. Belum Optimalnya Belanja Pemerintah Daerah dalam Mendukung Pertumbuhan

Terbatasnya kuantitas dan kualitas infrastruktur wilayah menuntut peran pemerintah dalam pembiayaan prasarana publik. Porsi belanja modal dalam APBD (seluruh kabupaten/kota dan provinsi) di Sumatera Selatan pada tahun 2013 sebesar 19,07 persen dari total belanja. Sementara itu, 12,58 persen APBD merupakan belanja pegawai (Gambar 14). Postur APBD semacam ini kurang responsif terhadap kebutuhan riil percepatan pertumbuhan ekonomi daerah. Fakta ini menjadi paradok pembangunan bila dihubungkan dengan kondisi kerusakan jalan yang amat parah. Infrastruktur wilayah merupakan salah satu kunci utama daya saing dan daya tarik daerah. Tanpa dukungan infrastruktur yang baik, sulit diharapkan terealisasinya potensi investasi yang besar di Sumatera Selatan, baik yang berasal dari domestik (dalam daerah) maupun dari luar.

Gambar 14
Komposisi Belanja Pemerintah Daerah 2013



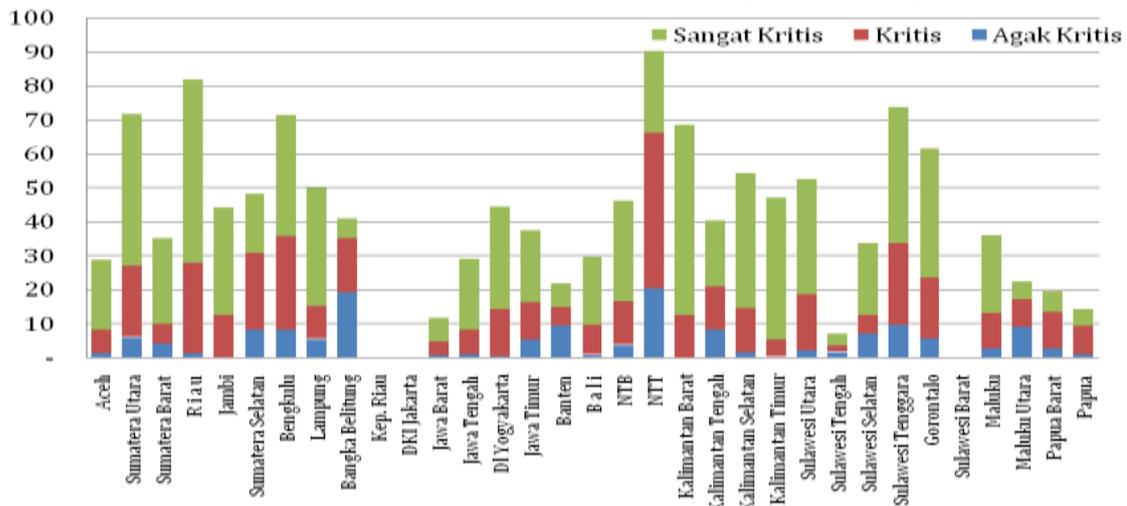
Sumber: BPS, 2013

7. Berkurangnya Daya Dukung Lingkungan

Pertumbuhan sektor perkebunan dan pertambangan ternyata diiringi dengan memburuknya daya dukung lingkungan. Secara nasional, tingkat kerusakan lingkungan di Sumatera Selatan termasuk tinggi (Gambar 15).

Rendahnya daya dukung lingkungan mengancam keberlanjutan pertumbuhan, apalagi untuk perekonomian yang masih bertumpu pada sumber daya alam dan jasa lingkungan. Dampak yang ditimbulkan bisa sangat luas yang meliputi penurunan tingkat kesuburan tanah, menurunnya keragaman hayati, meningkatnya kerentanan bencana alam, pendangkalan daerah aliran sungai, dan berkurangnya kualitas sumber daya air wilayah. Diperlukan upaya-upaya yang komprehensif untuk memulihkan daya dukung lingkungan agar prospek pertumbuhan daerah tetap terjaga.

Gambar 14
Persentase Luas Lahan Kritis terhadap Luas Wilayah



Sumber: BPS, 2012

D. Prospek Pembangunan Tahun 2015

Dengan potensi yang dimilikinya serta perkiraan dinamika lingkungan yang mempengaruhi, perekonomian Sumatera Selatan diperkirakan akan tumbuh positif hingga tahun 2019. Konsumsi rumah tangga diperkirakan tetap menjadi sumber pertumbuhan, namun peran investasi diperkirakan akan meningkat. Membaiknya kualitas infrastruktur diperkirakan akan diikuti meningkatnya minat investor dalam mengembangkan industri pengolahan. Sementara itu ekspor akan menghadapi tantangan berat terkait pelambatan pertumbuhan ekonomi di negara-negara maju. Selama ini komoditas ekspor daerah berupa komoditas primer yang akan diolah menjadi produk final di luar negeri. Melemahnya permintaan produk akhir akan diikuti pelemahan permintaan bahan baku.

1. Sasaran pertumbuhan ekonomi Sumatera Selatan dalam RPJMN 2015-2019 sebesar 5,8 – 7,5 persen dapat tercapai. Selama tahun 2014 kinerja ekonomi Sumatera Selatan terus membaik. Perekonomian kawasan Sumatera dari sisi sektoral ditopang oleh perbaikan kinerja sektor pertanian, industri pengolahan, dan konstruksi. Sektor pertanian pada tahun 2015 diperkirakan membaik sejalan dengan meningkatnya kinerja perkebunan kelapa sawit di Sumatera Selatan. Melimpahnya hasil panen kelapa sawit akan memberikan dampak positif bagi industri CPO. Komoditas kelapa sawit akan terus tumbuh seiring dengan permintaan domestik dan dunia akan CPO yang terus meningkat. Pemerintah juga diperkirakan akan mendorong pengembangan minyak nabati melalui mandatori biofuel. Di sisi lain, prospek investasi ke depan masih besar. Pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Api api menunjukkan optimisme aktivitas ekonomi yang membaik di Sumatera Selatan.
2. Sasaran pengurangan tingkat kemiskinan dalam Buku III RPJMN 2015-2019 adalah 12,2 – 8,6 persen, sedangkan pada tahun 2013 tingkat kemiskinan di

Provinsi Jambi sebesar 14,24 persen, untuk itu diperlukan upaya konsisten untuk menurunkan tingkat kemiskinan di provinsi ini. Selama kurun waktu 2014-2019 Provinsi Sumatera Selatan harus menurunkan persentase penduduk miskin sebesar 5,64 poin persentase atau 0,94 poin persentase per tahun. Peluang untuk mempercepat penurunan kemiskinan masih terbuka dengan melakukan peningkatan produktivitas sektor pertanian dan industri kecil, dua lapangan usaha yang menjadi konsentrasi penduduk miskin.

E. PENUTUP

1. Isu Strategis

Dari hasil analisis dan informasi yang tersedia, serta memperhatikan kriteria isu strategis: (i) berdampak besar bagi pencapaian sasaran pembangunan nasional; (ii) merupakan akar permasalahan pembangunan di daerah; dan (iii) mengakibatkan dampak buruk berantai pada pencapaian sasaran pembangunan yang lain jika tidak segera diperbaiki, maka isu-isu strategis Provinsi Sumatera Selatan adalah sebagai berikut:

- a. Peningkatan produktivitas pertanian
- b. Pengembangan industri unggulan daerah
- c. Peningkatan iklim investasi
- d. Pembangunan infrastruktur wilayah
- e. Peningkatan kualitas sumber daya manusia
- f. Peningkatan kualitas belanja pemerintah daerah
- g. Pemulihan daya dukung lingkungan

2. Rekomendasi Kebijakan

Penanganan isu-isu strategis daerah diperkirakan akan dapat meningkatkan kinerja perekonomian daerah secara keseluruhan. Oleh karena itu, kebijakan yang perlu ditempuh dalam percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Provinsi Sumatera Selatan adalah sebagai berikut:

- a. Peningkatan penyuluhan pertanian dan akses petani terhadap teknologi tepat guna.
- b. Pembangunan dan pemeliharaan jaringan irigasi.
- c. Perbaikan distribusi dan akses petani pada sarana produksi pertanian.
- d. Penyederhanaan proses perijinan usaha dengan mengurangi waktu dan besarnya biaya yang diperlukan.
- e. Pembangunan dan pemeliharaan jaringan jalan wilayah.
- f. Peningkatan kapasitas produksi listrik wilayah.
- g. Peningkatan akses pendidikan menengah dan pendidikan vokasional.
- h. Revitalisasi Balai Latihan Kerja.
- i. Peningkatan alokasi belanja modal pemerintah untuk infrastruktur daerah.
- j. Rehabilitasi lahan kritis dan pengendalian pemanfaatan lahan untuk perkebunan dan pertambangan.